

## **BAB II**

### **INVASI DAN PENDUDUKAN MILITER**

#### **AMERIKA SERIKAT DI IRAK**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kebijakan AS menginvasi Irak yang berawal dari peristiwa 11 September 2001. Akan dibahas juga pendudukan militer AS di Irak dan situasi politik di Irak paska invasi serta kebijakan-kebijakan George W. Bush selama pendudukan tersebut termasuk kesepakatan keamanan antara AS dengan Irak.

#### **A. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak**

Pada tahun 2001, George Walker Bush, putra tertua dari mantan presiden ke 41 AS, George Herbert Walker Bush, menjadi presiden ke 43 AS. Terpilihnya George W. Bush sebagai presiden AS pada tahun 2001 merupakan pemilihan yang paling diperdebatkan dalam sejarah Negara tersebut. Bush Jr adalah calon dari partai Republik, ia mengalahkan wakil presiden Al Gore, kandidat dari partai Demokrat. Bush Jr juga presiden pertama sejak Benjamin Harrison pada tahun 1888 yang memenangkan pemungutan suara berdasarkan *electoral vote*, sementara gagal dalam pemungutan suara berdasarkan *popular vote* diseluruh Negara bagian. Bush Jr. menjadi gubernur Texas pada tahun 1995, sebagai gubernur sebuah Negara bagian yang paling padat penduduknya, Bush memperoleh reputasi sebagai politikus yang paling efektif, mandiri dan demokratis. Ia dikenal sebagai

nilai-nilai fiscal konserfaktif social yang dikombinasikan dengan pendekatan disektor swasta dalam meningkatkan bidang pendidikan dan membuka peluang kerja untuk minoritas dan masyarakat yang lemah. Namun citra Bush Jr. yang pada awal pemerintahannya diasosiasikan sebagai kekuatan yang bersifat rendah hati (*a humble power*) meskipun tetap memperjuangkan kebebasan.<sup>34</sup>

Kebijakan pemerintahan George W. Bush pada awal pemerintahannya hampir sama dengan kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pendahulunya Bill Clinton yang mengutamakan penyebaran demokrasi dan pasar bebas ke negara-negara lain. Meskipun peran AS di dunia internasional mengalami sedikit peningkatan disbanding dengan era Clinton. Karena tidak hanya kebijakan yang baru dari presiden Bush dan hanya meneruskan kebijakan Clinton membuat Bush kurang populer dimata masyarakat AS. Namun kurang poplernya Bush tersebut terselamatkan dengan terjadinya tragedy 11 September 2001. Peristiwa tersebut dinilai sebagai tamparan keras bagi system pertahanan nasional AS yang mana dijadikan landasan utama pembuatan kebijakan luar negeri AS untuk memerangi terorisme dalam rangka melindungi kepentingan nasional AS.

### **1. Tragedi 11 September 2001**

Pagi itu 11 September 2001, dunia internasional dikejutkan oleh suatu peristiwa dimana symbol kekuatan ekonomi dan pertahanan Amerika Serikat, yaitu gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Tepat pukul 08.45 waktu New York, sekelompok teroris membajak pesawat dan menabrakan pesawat bajakan mereka (Boeing 767) yang berisi bahan bakar 90.770 liter ke Tower Utara

---

<sup>34</sup> Suzie Sudarman, "*Norma-Norma, Identitas, dan Politik Luar Negeri AS Period eke 2 Bush*",

WTC. Setelah itu, pesawat kedua yang juga Boeing 767 menabrak ke Tower Selatan WTC dan pesawat terakhir yaitu Boeing 757-200 menabrak sayap barat gedung Pentagon, Washington DC.<sup>35</sup>

Serangan teroris yang menghancurkan menara kembar WTC dan sebagian gedung Pentagon melalui pesawat sipil tersebut telah meluluh-lantakkan asset-aset ekonomi AS hanya dalam hitungan jam. Serangan atas New York dan Washington tersebut juga merupakan tamparan keras atas system pertahanan nasional AS. Tragedy 11 September tersebut merupakan jawaban atas ketakutan AS terhadap terorisme yang selama ini dianggap ancaman paling serius setelah runtuhnya komunisme. Dalam kasus tragedi 11 September ini pihak AS menuduh kejadian itu adalah tindakan para teroris. Dan yang menjadi tertuduh adalah Osama Bin Laden dan organisasi yang dipimpinnya yaitu Al-Qaeda.

Paska tragedi 11 September 2001, AS menuduh beberapa negara berbahaya bagi keamanan nasional AS diantaranya Irak. Irak dituduh Amerika Serikat masih menyimpan senjata kimia dan biologi yang dianggap bias mengganggu perdamaian dunia. Irak dianggap sebagai pihak yang potensial menjalin hubungan dengan berbagai organisasi teroris dan memasok senjata pemusnah massal kepada mereka. Menurut Bush, aksi militer ke Irak adalah untuk perlucutan senjata pemusnah massal supaya tidak jatuh ke tangan teroris.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Halim Mahally, *Membongkar Ambisi Global AS* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal.7

<sup>36</sup> "Langkah Mundur Perangi Terorisme" oleh Sudirman HN, dalam *...* diakses 26

## **2. Tuduhan Kepemilikan Senjata Pemusnah Massal Irak**

Issue kepemilikan senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*) telah membawa AS ke dalam perang ke-dua dibawah pemerintahan Bush setelah perang melawan terror dan perburuan Al Qaeda yang dianggap sebagai pelaku terror 11 September ke Afganistan. Isu ini telah menjadi kebijakan pelucutan senjata di Irak yang melibatkan PBB, sejak tahun 1996. Permasalahan ini muncul sejak kasus invasi Irak kepada Kuwait. Komisi khusus PBB untuk pelucutan senjata, UNSCOM ditugaskan sebagai pengawas dan pemeriksa pemusnahan seluruh senjata pemusnah di Irak sesuai dengan resolusi DK PBB 687, bertujuan untuk memastikan Irak apakah akan benar-benar menghancurkan seluruh program Irak dalam mengembangkan, menciptakan, dan mengirim berbagai macam senjata. Akan tetapi pemboman udara oleh AS dan Inggris pada 1998 yang disebabkan karena Irak sering melanggar kesepakatan, dimana penyerangan itu sebenarnya bertujuan untuk memaksa Irak supaya menerima tim UNSCOM tersebut justru mengakibatkan penolakan penuh Irak untuk menerima tim inspeksi senjata tersebut.

Keruntuhan UNSCOM digantikan oleh UNMOVIC, didirikan berdasarkan resolusi DK PBB 1284. Sejauh inspeksi senjata oleh PBB tersebut berjalan bertahun-tahun tetap tidak selesai. Amerika terus mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk memaksa Irak melucuti persenjataannya. Hal ini ditekankan oleh Bush dalam pidatonya bahwa Irak memiliki senjata biologi, nuklir, kimia, dan rudal balistik dengan jarak tempuh 150 km, dan jika PBB tidak

dan Inggris mengajukan resolusi ke PBB sebagai tuntutan keras pelucutan senjata dan mengancam akan menggunakan kekuatan senjata jika Irak menolak pelucutan senjata.

Menanggapi tuduhan AS tersebut Dewan Keamanan (DK) PBB secepatnya bersidang sehingga menghasilkan resolusi 1441 pada tanggal 8 November 2002.<sup>37</sup> Resolusi tersebut disepakati oleh Dewan Keamanan PBB. Isi resolusi 1441 adalah memaksa pelucutan senjata pemusnah massal Irak. Resolusi DK PBB No 1441 yang dikeluarkan pada 8 November 2002 merupakan pintu masuk bagi AS untuk menyerang Irak secara besar-besaran dan menggulingkan Saddam Hussein dari kekuasaannya. Resolusi tersebut memberikan wewenang yang tidak pernah ada sebelumnya pada Tim Inspeksi PBB untuk melakukan pemeriksaan terhadap situs-situs yang dicurigai, serta bertanya pada para ahli persenjataan Irak dalam upaya mengakhiri dugaan program senjata kimia, biologis dan nuklir yang dimiliki Irak.

Meskipun resolusi tersebut tidak memberikan mandate otomatis kepada Amerika Serikat untuk menyerang Irak jika terjadi pelanggaran resolusi, pelanggaran harus dilaporkan oleh Tim Inspeksi pimpinan Hans Blix ke DK PBB, tetapi sangat mungkin Resolusi itu digunakan sebagai senjata ampuh mengingat peluang terjadinya pelanggaran oleh Irak tetap terbuka. Sebagai contoh, pada 18 November 2002 sudah terjadi serangan pasukan koalisi Amerika Serikat dan

Sementara itu di dalam negeri, Kongres yang paling berwenang mengeluarkan pernyataan perang menyetujui rencana Bush. Yaitu persetujuan Kongres atas agenda invasi ke Irak berupa pengiriman pasukan militer yang diberi kewenangan oleh Kongres (*military engagement authorized by Congress*). Keputusan ini tercermin dari H.J Res. 114, 16 Oktober 2002, dengan jumlah voting di badan Senat 77 setuju dan 23 menentang. Sedangkan di DPR jumlah voting menunjukkan 296 setuju dan 133 menentang. Dan disahkan oleh Kongres sebagai Public Law (Hukum Public) Nomor: 107-243 dan berlaku sejak saat itu.<sup>39</sup>

Peluang terjadinya pelanggaran oleh Irak terhadap Resolusi 1441 cukup besar mengingat Irak tercatat sebagai negara dengan kekuatan militer yang cukup besar di masa lalu. Data *The International Institute for Strategic Studies* (1989) menunjukkan jumlah personil militer Irak adalah satu juta orang lebih ditambah 850 ribu tentara cadangan. Ketika itu Irak memiliki 5600 tank (sedangkan Kuwait hanya memiliki 275 tank). Setelah Perang Teluk I (1980-1989) melawan Iran, Irak merupakan kekuatan militer terkuat di Timur Tengah. Bahkan lebih kuat dari gabungan seluruh kekuatan militer anggota Dewan Kerjasama Teluk Parsi atau Gulf Cooperation Council (GCC) yang terdiri atas Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.<sup>40</sup>

Resolusi 1441 bukan resolusi pertama bagi Irak. Setelah Perang Teluk tahun 1991, PBB mengeluarkan resolusi untuk memeriksa seluruh senjata pemusnah massal yang mungkin dimiliki Irak. Namun, tim inspeksi yang menyelidikinya tidak menemukan apa-apa. Dan ketika mereka meminta

<sup>39</sup> "Declaration of war by the United States",

[http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration\\_of\\_war\\_by\\_the\\_United\\_States](http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_war_by_the_United_States), diakses 13 Mei 2011

<sup>40</sup> Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, 1991, hal. 148-149

memeriksa Istana Presiden, Saddam menolak dan mengusir tim inspeksi. Presiden George W. Bush tetap mengancam bahwa jika Irak terbukti menyembunyikan senjata pemusnah massal, perang akan meletus.<sup>41</sup>

Pada awalnya, Irak memang menunjukkan keengganannya untuk bekerjasama dengan tim pemeriksa persenjataan PBB yang dikirim PBB untuk memeriksa apakah Irak masih mempunyai senjata pemusnah massal. Setelah AS dan Inggris mengirimkan pasukan dalam jumlah besar dikawasan Teluk, Irak menunjukkan kerjasamanya dengan mengijinkan tim PBB bekerja dengan leluasa. Namun kemajuan yang diperoleh Tim pemeriksa Persenjataan PBB dianggap AS tidak signifikan dan sangat terlambat. Tim PBB tidak menemukan persenjataan pemusnah massal yang berasal dari bahan peledak kimia atau biologis di Irak tetapi AS menganggap itu karena Irak menyembunyikannya. Anggapan AS tersebut seakan mendapat pembenaran ketika Tim Pemeriksa Persenjataan PBB menemukan bahwa Irak masih mempunyai rudal Al Samoud II yang daya jelajahnya melampaui batas yang ditetapkan oleh PBB yakni diatas 150 kilometer.<sup>42</sup>

Pada tanggal 19 Desember 2002, ketua tim inspeksi senjata DK PBB, Hans Blix, memberikan ringkasan deklarasi Irak ke DK PBB.<sup>43</sup> Pada saat yang bersamaan, Amerika Serikat justru mengeluarkan respon yang negatif atas deklarasi tersebut. Dalam laporannya di depan DK PBB pada tanggal 9 Januari 2003, Hans Blix menyampaikan bahwa tim inspeksi yang dipimpinnya tidak

---

<sup>41</sup>*Tempo*, 24 November 2002

<sup>42</sup> "Tim PBB Segel Rudal Al-Samoud 2 Irak" dalam <http://arsip.gatra.com/2003-02-19/artikel.php?id=25595>, diakses 13 Mei 2011

<sup>43</sup>*Kompas*, 20 Desember 2002

menemukan indikasi adanya senjata pemusnah massal yang bias memicu perang.<sup>44</sup> Kemudian pada tanggal 27 Januari 2003, Hans Blix menyampaikan laporan resmi pertama hasil kerja tim inspeksi kepada DK PBB yang kemudian dibahas oleh DK PBB dua hari berselang.<sup>45</sup>

Pada awalnya AS masih berharap bahwa kehendaknya untuk menyerang Irak mendapatkan persetujuan dari anggota DK PBB. Oleh sebab itu AS berupaya menyusun resolusi kedua DK PBB yang isinya membuka peluang untuk melakukan perang terhadap Irak jika negara itu tidak mau bekerjasama secara penuh dengan Tim Pemeriksa Persenjataan PBB. Sehingga perlu diberikan batas waktu kepada Irak untuk memenuhi tuntutan pelucutan persenjataannya dan apabila Irak melanggar batas waktu yang diberikan kepadanya maka perang terhadap Irak dapat dilakukan.

Dan untuk melaksanakan tujuannya, Amerika Serikat berdiplomasi habis-habisan agar bias segera memulai penyerangan ke Irak. Tidak hanya jalur diplomasi saja tetapi Amerika Serikat juga melancarkan taktik promosi dan meyakinkan dunia bahwa sikap melucuti persenjataan Irak dan menjatuhkan rezim Saddam Hussein demi perdamaian dunia dan kemanusiaan. Diantaranya, diplomasi Amerika Serikat ini bergantung kepada beberapa negara seperti: Turki, sebagai negara yang berbatasan dengan Irak, Nugini Bissau, Afrika Barat, Kamerun, Meksiko, yang mempunyai satu suara di DK PBB sebagai anggota tidak tetap sampai hingga 31 Desember 2003, dan juga Angola, Pakistan dan Chile yang juga memiliki satu suara di DK PBB sebagai anggota tidak tetap

---

<sup>44</sup>*Kompas*, 29 Januari 2003

<sup>45</sup>*Ibid*

sampai 31 Desember 2004. Namun begitu, negara yang pasti mendukung agresi Amerika Serikat ini adalah Turki, Nugini Bissau, Angola, dan Meksiko.<sup>46</sup> Disamping beberapa negara seperti Jerman, Prancis, Russia dan China yang memberikan respon negatif terhadap tindakan agresi militer Amerika Serikat ini. Bahkan Prancis dan Russia yang merupakan anggota tetap DK PBB mengancam akan menggunakan hak veto, Prancis dan Rusia bias membatalkan dikeluarkannya resolusi kedua yang diupayakan AS, walaupun anggota DK PBB yang lain menyetujuinya.

Pada awalnya, keinginan menyerang Irak bermula dari kesepakatan dua negara yaitu AS dan Inggris. Di akhir Januari tahun 2003, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dijadwalkan bertolak ke AS untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden AS George W. Bush di Camp David. Pada pertemuan ini kesepakatan tindakan perang terhadap Irak mulai terbentuk antar kedua negara ini. Pada tanggal 15 Februari 2003, Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell membeberkan data intelijen AS mengenai persenjataan kimia dan biologi serta mengembangkan misil dan nuklir yang bertentangan dengan ketentuan PBB.

Saat tidak ada jalan lain AS menyatakan akan langsung mengadakan perang terhadap Irak tanpa persetujuan DK PBB. AS dan Inggris juga memboikot pertemuan DK PBB dengan mengatakan bahwa akan menyerang Irak tanpa dukungan PBB. Sikap ini diambil setelah adanya pertemuan segitiga antara Presiden Amerika Serikat George W. Bush, PM Inggris Tony Blair dan PM Jose  
M. ... di ... pada 16 Maret 2003 menjadi

semacam kalimat awal dari “bab penutup” upaya diplomasi kubu Washington dalam upaya mereka mendapatkan dukungan untuk menginvasi Irak dan Bush memberikan ultimatum kepada PBB untuk mendukung atau tidak rencana tersebut. Sedangkan kubu anti perang di Dewan Keamanan bersikeras menentang resolusi baru untuk Irak. Amerika Serikat akan memukul genderang perang setelah mencabut draft resolusi yang diusulkannya bersama Inggris dan Spanyol. Maka diputuskan untuk mengeluarkan ultimatum kepada Presiden Saddam Hussein untuk mundur meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam atau menghadapi resiko perang. Sebagian alasan dari dikeluarkannya ultimatum tersebut karena Saddam Hussein adalah seorang tiran yang ekspresif yang jika dimungkinkan akan menyerang negara tetangganya serta tega membunuh rakyatnya sendiri dengan menembakkan senjata kimia.<sup>47</sup>

### **3. Invasi Amerika Serikat ke Irak**

Ultimatum 48 jam ditetapkan AS dan Inggris bagi Saddam Husein untuk mundur dari jabatannya tidak dihiraukan meskipun ancamannya adalah perang terhadap bangsanya. Sikap Saddam yang tidak mau memenuhi ultimatum yang ditetapkan oleh AS dan Inggris langsung di jawab dengan serangan militer. Dan akhirnya, pada Kamis, 20 Maret 2003 pagi, batas waktu yang diultimatumkan Presiden George W. Bush pada Selasa, 18 Maret 2003 pukul 01.00 GMT telah lewat. Amerika Serikat bersama sekutunya akhirnya melakukan agresi militer ke Irak dan menggunakan sandi “Operasi Pembebasan Irak” atau “Operation Iraqi Freedom”.Sebanyak 250.000 tentara Amerika Serikat didukung oleh hampir

45.000 tentara Inggris, 2.000 tentara Australia, dan 200 tentara Polandia menggempur dan memasuki Irak lewat Kuwait. Rencana untuk masuk Irak lewat utara dibatalkan setelah Turki menolak wilayahnya digunakan untuk tujuan tersebut. Pasukan gabungan pimpinan AS juga mendapat dukungan dari pasukan Kurdi yang berjumlah sekitar 50.000 orang.<sup>48</sup>

Agresi militer ini dilakukan setelah Presiden Irak, Saddam Husein dan kedua putranya, Uday dan Qussay menolak meninggalkan negerinya. Tindakan Amerika Serikat ini berarti telah meninggalkan kerangka PBB dan melawan opini publik internasional serta mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut Perdana Menteri Belgia, Guy Verhofstadt, pengabaian hukum internasional adalah harga yang terlalu tinggi untuk pelucutan senjata Irak.<sup>49</sup> Suara-suara masyarakat dunia yang menentang perang sama sekali tidak didengarkan oleh Washington.

Ketika itu muncul juga kontroversi, pro dan kontra yang mempertanyakan apakah tindakan AS tersebut melanggar hukum internasional atau tidak. Sekjen PBB saat itu Koffi Annan dan mantan Sekjen PBB Boutros Boutros Ghali secara terang-terangan menyatakan bahwa tindakan AS dan koalisinya tersebut melanggar hukum internasional, juga melanggar piagam PBB. Banyak orang memandang serangan terhadap Irak itu merupakan cerminan standar ganda AS, di satu sisi membiarkan Israel membangun reaktor nuklirnya dan memiliki senjata pemusnah massal, tetapi di sisi lain menjatuhkan hukuman kepada Irak yang dicurigai memiliki senjata pemusnah massal. Akan tetapi, AS dan Inggris

---

menyatakan serangan terhadap Irak tersebut sah dan pantas dilakukan karena Irak mengingkari ketentuan PBB. Di dukung Polandia, Australia, sejumlah negara Eropa termasuk Ceko, Denmark, Portugal, Italia, Hongaria dan Spanyol, AS dan Inggris menggempur Irak.<sup>50</sup>

Rabu, 9 April 2003, Baghdad jatuh ke tangan pasukan koalisi pimpinan AS yang juga berarti jatuhnya rezim Saddam Hussein. Tidak ada yang menduga bahwa Baghdad begitu cepat jatuh, bahwa Saddam Hussein begitu cepat tak berdaya. Jatuhnya Baghdad ke tangan pasukan militer koalisi pimpinan AS tidak berarti perang telah usai meskipun pada 1 Mei 2003, diatas geladak kapal induk USS Abraham Lincoln, Presiden Bush menyatakan perang telah selesai. "Mission Accomplished" demikian bunyi tulisan pada spanduk yang dibentangkan di kapal. Saat itulah dimulai masa pendudukan pasukan militer koalisi pimpinan AS di Irak.<sup>51</sup>

#### **B. Pendudukan Irak Oleh Pasukan Militer Koalisi Pimpinan AS**

Setelah perang dinyatakan selesai, perburuan terhadap Saddam Hussein beserta seluruh kroninya dan para pejabat rezim Saddam menjadi prioritas pasukan pendudukan. Pada bulan Agustus 2003, kedua putra Saddam Hussein yaitu Uday dan Qusay tertembak saat akan ditangkap. Banyak mantan pemimpin Irak yang tertangkap, menyerahkan diri, atau tewas tertembak. Akan tetapi semua itu tidak menghentikan perlawanan terhadap pasukan pendudukan. Di mana-mana muncul kelompok bersenjata yang menyerang pasukan koalisi dengan berbagai

akhirnya tertangkap di sebuah wilayah di kampung halamannya, Tikrit, Irak bagian utara.<sup>52</sup>

### **1. Pembentukan Pemerintahan Baru di Irak**

Dengan berakhirnya invasi AS yang berhasil dikuasainya ibukota Baghdad, dan ditangkapnya Saddam Hussein pada tanggal 13 Desember 2003, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Irak. Rakyat Irak sangat gembira dengan adanya berita berakhirnya rezim Saddam Hussein, namun di sisi lain rakyat Irak menghendaki terbentuknya pemerintahan sendiri yang bebas dari campur tangan asing termasuk keterlibatan pendudukan pasukan koalisi di pimpinan AS. Namun karena masih rapuhnya kondisi internal Irak serta berbagai permasalahan antara berbagai kelompok kepentingan, situasi ini dimanfaatkan pemerintah AS untuk membentuk perangkat teknis administrative yang disebut sebagai pemerintahan transisi. CPA (*Coalition Provisional Authority*) adalah nama perangkat administrasi sementara yang dipimpin oleh Jendral Jay Ganer, yang kemudian digantikan oleh Paul D.Bremer.

Dalam regulasi CPA tanggal 16 Mei 2003, disebutkan bahwa CPA akan menjalankan kekuasaan pemerintahan di Irak untuk sementara waktu. Tugasnya antara lain:<sup>53</sup>

- a. Menyediakan administrasi efektif selama masa transisi
- b. Mengembalikan keamanan dan stabilitas
- c. Menciptakan kondisi yang memungkinkan warga Irak memutuskan sendiri masa depan politik mereka

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal.xiv

- d. Memfasilitasi perbaikan ekonomi, rekonstruksi, serta pembangunan berkelanjutan
- e. Menjalankan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislative.

Langkah pertama yang dilakukan Jay Garner adalah memprakarsai pertemuan-pertemuan antar fraksi-fraksi oposisi Irak yang berlangsung di kota kuno Al Ur dekat Nasiriya Irak Selatan pada hari Selasa 15 April 2003.<sup>54</sup> Dari pertemuan tersebut menghasilkan 13 butir keputusan antara kelompok oposisi<sup>55</sup>, kesepakatan itu adalah:

- a. Negara Irak berbentuk demokrasi
- b. Pemerintah Irak mendatang tidak didasarkan pada identitas komunal
- c. Pemerintah masa depan harus dikelola sebagai suatu system demokrasi federal namun harus di konsultasikan dengan rakyat
- d. Kesepakatan selanjutnya adalah aturan-aturan hukum harus di tegakkan
- e. Irak harus membangun dengan menghormati perbedaan termasuk menghormati peran perempuan
- f. Segera diadakan pertemuan berikutnya guna membahas peran agama dalam negara dan masyarakat
- g. Irak harus memilih sendiri pemimpin mereka, tidak melibatkan pihak asing.
- h. Kekerasan politik harus dihentikan dan rakyat Irak harus segera mengorganisasikan untuk melakukan rekonstruksi, baik tingkat nasional maupun local

- i. Rakyat Irak dan koalisi harus bekerjasama untuk memulihkan keamanan dan memperbaiki pelayanan umum
- j. Partai Bath harus dibubarkan dan pengaruhnya harus dikikis
- k. Harus ada dialog terbuka dengan seluruh kelompok politik
- l. Mengutuk aksi penjarahan dan penghancuran dokumen-dokumen penting
- m. Harus ada pertemuan lanjutan dalam sepuluh hari guna membicarakan pembentukan pemerintahan Irak.

Tidak lama setelah penunjukan Jay Garner sebagai penguasa sementara di Irak, AS menunjuk utusan baru untuk menggantikan tugas Garner, yaitu Paul Brummer. Kedatangan Brummer tidak berarti Garner di singkirkan dimana Garner akan bekerja di bawah Brummer dan akan diberikan tanggung jawab khusus. Namun ada sumber lain yang mengatakan kalau Garner di pulangkan ke Washington. Pada 17 Juni 2003, setelah dua bulan memegang kekuasaan sementara di Irak. Paul Brammer melakukan terobosan politik yang cukup signifikan dengan membentuk Dewan Pemerintahan Irak. Dewan Pemerintahan ini akan mengisi kekosongan pemerintahan Irak sejak jatuhnya Saddam Hussein. Anggota Dewan dipilih berdasarkan dengan presentasi agama dan etnik di Irak, maka dewan itu terdiri dari 13 muslim Syiah, 5 muslim Sunni, 5 suku Kurdi, 1 Kurdi, 1 Kristen dan 1 Turmenistan.<sup>56</sup>

Menurut Bremmer, Dewan Pemerintahan ini memiliki wewenang penuh dalam pemerintahan dan percaturan politik. Dewan Pemerintahan Irak mempunyai wewenang di bidang hukum, penandatanganan kontrak kerjasama, serta

---

<sup>56</sup> "Pemerintahan Koalisi Sementara (Irak)" dalam

menunjuk anggota komite untuk mmenyusun kerangka konstitusi baru persiapan pemilu Irak. Namun demikian Brummer menegaskan bahwa ia mempunyai hak veto untuk membatalkan, menunda, atau menghapus Dewan Pemerintahan Irak itu.

Pembentukan Dewan Pemerintahan Irak itu sendiri menuai kritik dari rakyat Irak itu sendiri. Walaupun telah terbentuk Dewan Pemerintahan Irak, namun dengan adanya hak veto Paul Brammer, kekuasaan Irak tetap berada ditangannya, bos AS paling tinggi di Irak, sampai waktu peralihan kedaulatan kepada orang-orang Irak. Penyerahan kedaulatan kepada Irak di rencanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2004. Penyerahan kedaulatan itu mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB melalui resolusi No. 1546 yang mengakhiri pendudukan Irak pada 30 Juni 2004 dan menyerahkan pada pasukan internasional pimpinan AS untuk menjaga perdamaian. Resolusi itu member hak kepada pemimpin Irak yang baru untuk mengintruksikan pasukan asing hengkang kapan saja, selain menetapkan batasan untuk menyelenggarakan pemilu Irak selambat-lambatnya 31 Januari 2005.<sup>57</sup> Iyad Allawi, anggota Dewan Pemerintah Irak yang telah lama menjalin hubungan dengan CIA, dipilih sebagai perdana menteri pemerintahan sementara Irak, Allawi adalah seorang muslim Syiah yang kaya dan mantan anggota Partai Baath pimpinan Saddam Hussein.<sup>58</sup>

Dua tahun paska jatuhnya rezim Saddam Hussein, Irak melaksanakan pemilu, Aliansi Irak Bersatu (UIA) yang merupakan koalisi partai kaum Syiah memenangi pemilu Irak dengan memperoleh 140 kursi dari 275 kursi parlemen di

---

<sup>57</sup>SABILI, 2 Juli 2004, hal 44-45

<sup>58</sup> "Pemerintahan Koalisi Sementara (Irak)" dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_Koalisi\\_Sementara\\_\(Irak\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Koalisi_Sementara_(Irak)) diakses 26 Mei 2011

Dewan Nasional. Dari 12 partai yang akan duduk dalam Dewan Nasional, koalisi utama kaum Kurdi memperoleh 75 kursi, sedangkan partai Perdana Menteri Irak saat itu, Iyad Allawi, hanya memperoleh 40 kursi. UIA yang didukung pemimpin spiritual kaum Syiah Ayatollah Ali Sistani hanya memperoleh kurang dari separuh dari total suara sah dari hasil pemilu yang dilaksanakan 30 Januari 2005. Namun, setelah dikonversi kepada jumlah kursi, koalisi tersebut mendapatkan lebih daripada separuh jumlah kursi parlemen. Artinya jumlah itu menjadi mayoritas dalam Dewan Nasional. Hasil dari pemilu yang pertama sejak Saddam Hussein dijatuhkan pada April 2003 oleh kekuatan invasi pasukan Amerika Serikat itu membuat kaum Syiah memimpin Negeri Seribu Satu Malam itu untuk pertama kalinya di negara Arab dalam lebih dari 1.000 tahun terakhir. Namun rendahnya partisipasi dari rakyat Irak terutama kaum Sunni mengancam legitimasi pemerintahan hasil pemilu ini.<sup>59</sup>

Parlemen hasil pemilu 30 Januari 2005 sepakat mengangkat Jalal Talabani, tokoh utama Kurdi Irak sebagai presiden negeri itu. Sementara Ghazi Yawer, seorang Sunni, dan Adel Abdul Mahdi (Syiah) menjadi wakil presiden. Ketiganya akan berperan penting dalam menunjuk siapa yang bakal menjadi kepala pemerintahan. Sementara Ibrahim Jafari, seorang politikus Syiah, menjadi Perdana Menteri sebelum digantikan Nouri Al Maliki pada 20 Mei 2006<sup>60</sup>. Talabani, pemimpin Uni Patriot Kurdistan, berharap terpilihnya tiga posisi penting dalam lembaga eksekutif tersebut akan menjadi langkah maju menuju Irak yang bebas dan demokratis, setelah selama puluhan tahun diperintah oleh rezim Saddam

---

<sup>59</sup> "2005 UIA Menangi Pemilu Irak" dalam <http://bataviase.co.id/node/99286>, diakses 26 Mei 2011

Hussein yang oleh Barat dinilai sebagai diktator. Penunjukan Talabani merupakan kemenangan politik penting bagi masyarakat Kurdi Irak, yang mengalami penderitaan pada masa pemerintahan Saddam. Terbukalah peluang bagi rivalnya, Massoud Barzani, pemimpin Partai Demokrat Kurdistan, untuk memimpin pemerintah daerah otonomi Kurdi di utara. Terpilihnya Talabani bukanlah hal istimewa, karena aliansi partai-partai Kurdi keluar sebagai pemenang kedua setelah aliansi Syiah pada pemilu lalu. Berdasarkan kesepakatan, pos presiden untuk Kurdi, sementara pos Perdana Menteri dan ketua parlemen untuk Syiah dan Suni. Sementara itu, Hajem al-Hassani, seorang tokoh Suni dipilih sebagai ketua Majelis Nasional (parlemen). Penunjukan Hajem amatlah bijak. Sekalipun mayoritas warga Suni memboikot pemilu dan partai-partai Suni tidak meraih suara berarti dalam pemilu lalu, kenyataannya seorang tokoh mereka menduduki salah satu pos bergengsi. Lewat perdebatan sengit di parlemen, tampaknya Hajem dipilih sebagai jalan keluar untuk memecah kebuntuan, sekaligus sebagai upaya untuk melunakkan perlawanan kaum Suni. Pengangkatan Ghazi Yawer sebagai salah satu dari dua pos wakil presiden, pastilah juga masih dalam kerangka untuk melunakkan perlawanan itu.<sup>61</sup>

## **2. Instabilitas Keamanan dan Konflik Sekretarian di Irak**

Setelah pasukan koalisi berhasil menumbangkan rezim Saddam Hussein, namun invasi Amerika Serikat dan pasukan koalisi disadari oleh warga Irak sendiri sebagai agresi pendudukan atas negara mereka. Kesadaran tersebut

---

<sup>61</sup> "Pemerintahan Koalisi Sementara (Irak)" dalam

membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotism warga Irak yang akhirnya mendorong munculnya aksi perlawanan dari warga Irak.

Perlawanan dari para pejuang Irak yang melakukan gerilya sangat meresahkan Washington. AS bahkan membuat suatu gugus tugas operasi khusus seperti: Operasi Palu Besi (*Operation Iron Hammer*), Operasi Angin Puyuh (*Operation Ivy Cyclone*), dan Task Force (satuan tugas berkekuatan 121 yang khusus memburu Saddam Hussein) AS melakukan serangan balasan. Pengerahan operasi besar-besaran ini, berkaitan dengan kekhawatiran AS akan kegagalan mengatasi masalah Irak.

Meskipun gerakan perlawanan Irak belum bisa dikatakan menyeluruh dan massal atas pasukan AS. Masih terdapat segmen luas dari rakyat Irak, seperti suku Kurdi dan kaum Syiah yang hidup dalam waktu cukup panjang di bawah dominasi Muslim Sunni, bisa jadi melihat keberadaan pasukan AS itu merupakan jaminan politik agar tidak kembali ke belakang seperti era Saddam Hussein. Masing-masing pihak mempunyai tuntutan yang berbeda dan cenderung susah untuk ditemukan titik temunya dimana kekecewaan tersebut memunculkan konflik sektarian.

Hal ini bisa dipahami mengingat masyarakat Irak sangat plural dan heterogen, secara umum Irak dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok Sunni yang di jaman Saddam Hussein sebagai kelompok yang memerintah atau biasa disebut sebagai kelompok status quo. Kedua, kelompok mayoritas Syiah. Ketiga, kelompok minoritas yakni kelompok Kristen dan lain-

... .. kelompok minoritas etnis Kurdi Sunni. Kelompok

kelompok tersebut didalam melakukan proses pengidentifikasian diri cenderung didasarkan pada persamaan dan perbedaan yang melakat dalam dirinya.

Setelah Saddam jatuh, rezimnya hancur. Partainya, Parta Ba,ath, sebagai alat kekuasaannya berantakan, namun Irak tidak segera muncul sebagai sebuah negeri demokratik baru. Pluralitas dalam komposisi masyarakat dengan latar belakang social dan budaya tersebut menjadikan kevakuman di Irak semakin tak terkendali. Masing-masing mempunyai tujuan, dan tak jarang berbenturan satu sama lain. Baik dari kubu Sunni, Syiah maupun Kurdi yang mengakibatkan semakin runyamnya kondisi Irak. Maraknya konflik sectarian yang berdampak buruk pada semua lini politik, ekonomi, social, dan budaya membuat negara ini hampir mustahil dapat melakukan rekontruksi. Kalangan cendekiawan juga menjadi korban utama, hampir setiap hari terbetik berita adanya orang-orang yang dibunuh atau kabur meninggalkan Irak.<sup>62</sup> Menurut UNHCR, pada 2006 sekitar 1,7 juta orang menjadi pengungsi dalam negeri, sedangkan sekitar 2 juta orang lainnya mengungsi ke Suriah, Jordania, Mesir, dan Lebanon. 3,7 juta pengungsi tersebut hidup terlunta-lunta dan sangat mengenaskan yang merupakan eksodus terbesar sepanjang sejarah. 34.452 orang tewas selama tahun 2006, atau sekitar 94 orang per hari di Irak, demikian laporan yang diungkap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara akumulatif, korban warga sipil Irak sudah mencapai angka 655.000 orang sejak invasi dan pendudukan pasukan Amerika Serikat (AS) tahun 2003. AS sendiri kehilangan sekitar 3.000 tentaranya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>*Kompas*, 10 April 2003

<sup>63</sup>“KONFLIK SEKTARIAN DAN HEGEMONI POLITIK AS” oleh M. Subhi-Ibrahim,

### **3. Penambahan Pasukan Militer AS di Irak**

Pada tanggal 10 Januari 2007, Presiden George W. Bush telah mengumumkan strategi barunya untuk Irak. Dalam pidato di sebuah televisi, sang presiden mengakui kesalahannya, terutama bahwa ia mengerahkan terlalu sedikit pasukan untuk menyelesaikan tugas di Irak. Pasukan ini nantinya mempunyai tugas untuk mengendalikan kekerasan di Baghdad, dan bekerjasama lebih erat dengan angkatan bersenjata Irak. George W. Bush: “Upaya kita mengamankan Baghdad, gagal karena dua alasan utama: Tidak cukup pasukan di Irak dan Amerika untuk bias mengamankan pelbagai wilayah yang telah dibersihkan dari teroris dan pemberontak. Selain itu juga terlalu banyak pembatasan terhadap pasukan yang dikerahkan disana.”Meski gejolak kekerasan masih terus meningkat, Bush bersikeras AS akan mampu memenangi perang di Irak dan memulihkan situasi keamanan di Irak. Bush menegaskan dia dan komandan-komandan militer AS telah menganalisis semua pilihan yang ada di Irak. “Pada akhirnya, saya memilih menambah jumlah pasukan sebagai strategi baru kita di Irak. Ini pilihan terbaik untuk keberhasilan kita”, Bush member alasan.<sup>64</sup>

Strategi baru Bush untuk Irak ini merupakan puncak dari upaya peninjauan kembali strategi AS di Irak selama hampir 4 tahun sehingga mengakibatkan lebih dari 3.000 tentara AS tewas. Dimana hampir setiap hari, ledakan bom bunuh diri tidak pernah berhenti merenggut nyawa penduduk sipil Irak maupun pasukan militer AS dan koalisi. Dalam penambahan pasukan, Bush telah memerintahkan

---

<sup>64</sup>“Strategi Baru Bush Di Irak 2007”,

untuk mengirimkan sekitar 21.500 personil tentara ke Irak. 4000 marinir telah dikirim ke Provinsi Al-anbar dan 17.500 pasukan ke ibukota Irak yaitu Baghdad. Tim pertama telah tiba di Irak pada tanggal 15 Januari tahun 2007 sebanyak 3200 serdadu AS telah tiba di Baghdad, mereka merupakan rombongan pertama dari 21.500 pasukan tambahan yang dikirim ke Baghdad, mereka dikirim untuk melengkapi 137.000 serdadu yang masih bertahan di Irak. Dan strategi baru Bush untuk Irak kali ini memakan biaya sekitar Rp 6,8 miliar dollar. Kebijakan penambahan pasukan militer oleh George W. Bush dimaksudkan sebagai formulasi strategi baru untuk penyelesaian Irak yang terus bergolak sejak keputusan invasi ke Irak Maret 2003 dan Bush menyebut formulasi ini sebagai misi yang jelas, spesifik dan akan tercapai.<sup>65</sup>

Kehadiran pasukan AS di Irak selama ini memiliki fungsi ganda sebagai buffer zone bagi semua kepentingan yang hadir, sekaligus melakukan penetrasi kepentingan secara kasatmata melalui upaya politik yang mereka lakukan dalam rekonstruksi perang. Gedung Putih juga menyebutkan bahwa Perdana Menteri Irak Nuri Al-Maliki berjanji akan membantu AS dengan mengerahkan jumlah pasukan Irak yang cukup besar sehingga mampu menumpas kelompok bersenjata. Jika dilakukan dengan bekerjasama, Bush berharap strategi baru untuk Irak ini akan dapat menumpas teroris, kelompok perlawanan, dan membantu tentara Irak menguasai seluruh daerah di Irak.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>“Strategi Baru Bush Di Irak” dalam

[http://www.kompas.com/tekno/Strategi-Baru-Bush-di-Irak.html](#)

#### 4. Kesepakatan Keamanan AS dan Irak

Penarikan pasukan militer Amerika dari Irak telah menjadi isu perdebatan di Amerika Serikat sejak awal Perang Irak. Seperti perang telah berkembang dari awal fase 2003 invasi ke masa pendudukan paska invasi, opini publik AS telah berubah mendukung penarikan pasukan. Pada Mei 2007, 55 persen orang Amerika percaya bahwa perang Irak adalah sebuah kesalahan, dan 51 persen dari pemilih terdaftar menginginkan penarikan pasukan.<sup>67</sup> Pada akhir April 2007, Kongres AS meloloskan RUU yang menetapkan tenggat waktu untuk penarikan pasukan dari Irak, namun Presiden Bush memveto RUU tersebut.<sup>68</sup>

Sejara sebelum dan setelah invasi ke Irak tahun 2003, jajak pendapat di Amerika Serikat menunjukkan mayoritas besar mendukung perang, meskipun sejak Desember 2004 jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas publik AS sekarang berpikir invasi adalah sebuah kesalahan. Pada musim semi tahun 2007, survei umumnya menunjukkan mayoritas publik AS mendukung penetapan jadwal bagi penarikan pasukan militer dari Irak.<sup>69</sup> Survei menemukan bahwa kebanyakan mendukung penarikan bertahap dari waktu ke waktu ke penarikan langsung.<sup>70</sup>

Kehadiran pasukan militer multinasional pimpinan AS awalnya ditugaskan untuk menjaga keamanan di Irak termasuk dari terorisme dan akan membantu transisi politik di Irak. Selain itu pasukan multinasional juga akan membantu

---

<sup>67</sup><http://www.pollingreport.com/iraq.htm>, diakses 6 Juni 2011

<sup>68</sup> "Bush vetoes war-funding bill with withdrawal timetable" dalam [http://articles.cnn.com/2007-05-01/politics/congress.iraq\\_1\\_funds-military-operations-war-funding-withdrawal-timetable?\\_s=PM:POLITICS](http://articles.cnn.com/2007-05-01/politics/congress.iraq_1_funds-military-operations-war-funding-withdrawal-timetable?_s=PM:POLITICS), diakses 6 Juni 2011

<sup>69</sup><http://www.pollingreport.com/iraq.htm>, diakses 6 Juni 2011

<sup>70</sup> "Iraq: Relatively Less Important" dalam

rekonstruksi di Irak paska invasi dimana hal ini mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB. Pada bulan November 2006, PBB memperpanjang mandat tersebut sesuai dengan permintaan pemerintah Irak dimana pemerintahan Irak meminta agar pasukan multinasional berada di Irak setahun kedepan sementara Irak membentuk militernya sendiri.<sup>71</sup> Desember 2007, PBB kembali memperpanjang mandat kehadiran pasukan multinasional di Irak sampai dengan 31 Desember 2008 melalui resolusi 1790.<sup>72</sup>

Menjelang berakhirnya mandat PBB pada 31 Desember 2008, pemerintah AS dan Irak menyetujui suatu kesepakatan keamanan antara AS dan Irak yang bernama U.S.-Iraq Status of Forces Agreement (SOFA) yang memberikan kekuatan hukum dimana militer AS masih menginjakkan kakinya di negeri 1001 malam itu hingga akhir tahun 2011 dimana pasukan militer AS akan meninggalkan Irak.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> "UN renews mandate for Iraq troops" dalam

[http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle\\_east/6193880.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6193880.stm), diakses 6 Juni 2011

<sup>72</sup> "SECURITY COUNCIL, ACTING ON IRAQ'S REQUEST, EXTENDS 'FOR LAST TIME, MANDATE OF MULTINATIONAL FORCE" dalam

<http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9207.doc.htm>, diakses 6 Juni 2011

<sup>73</sup> "U.S.-Iraq Status of Forces Agreement" dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/U.S.-Iraq\\_Status\\_of\\_Forces\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/U.S.-Iraq_Status_of_Forces_Agreement), diakses 6 Juni 2011